

**ANALISIS KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMUKIMAN SAMAR KILANG KECAMATAN SYIAH UTAMA PASCA
13 TAHUN PEMEKARAN KABUPATEN BENER MERIAH**

Aprilia Hurdianti Lestari, Cut Maya Aprita Sari

(afrialia9641@gmail.com, cutmayaapritasari@unsyiah.ac.id)

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala)

ABSTRAK

Pemekaran kabupaten Bener Meriah yang sudah terjadi selama 13 tahun ternyata tidak mampu memberikan perubahan kepada pembangunan infrastruktur jalan yang ada di pemukiman Samar Kilang karena sebelum dan sesudah pemekaran kondisi jalan menuju Samar Kilang tetap masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pembangunan infrastuktur di wilayah pemukiman Samar Kilang, serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait ketertinggalan pembangunan infrastruktur di wilayah pemukiman Samar Kilang. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Kapabilitas Sistem Politik menurut Almond dan juga konsep pemekaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan di pemukiman Samar kilang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hubungan antar pemerintah belum terjalin secara maksimal, Tidak ada perencanaan yang matang saat musrenbang di lakukan, dan juga akibat dari Kurangnya respon serta tanggung jawab dari pemerintah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pemekaran kabupaten bener meriah belum berhasil, sehingga diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah untuk Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan Samar Kilang, Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan, Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur jalan di pemukiman Samar Kilang dan juga harus menempatkan prioritas kebijakan dan



meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan untuk pemukiman Samar Kilang.

Kata kunci: Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur, Samar Kilang

AN ANALYSIS OF THE UNDERDEVELOPED INFRASTRUCTURE OF SETTLEMENT IN SAMAR KILANG OF SYIAH UTAMA SUB-DISTRICT 13 YEARS AFTER REGIONAL EXPANSION IN BENER MERIAH REGENCY

ABSTRACT

The regional expansion of Bener Meriah which has been going on for 13 years is apparently unable to make changes in road infrastructure development of Samar Kilang settlement. This underdevelopment can be seen in the road condition of Samar Kilang before and after the regional expansion is still bad. The aim of this study is to investigate the factors that hinder the infrastructure development in Samar Kilang area and now how the government policies affects the underdevelopment of infrastructure in Samar Kilang. Therefore, the researcher used the theory of political system capabilities by Almond and the concept of expansion in analyzing the problem of this research. The result of this research show that there are several factors that hinder the development of the road infrastructure in Samar Kilang settlement: the relation between governments have not been well established, underprepared planning when the Development Planning Diliberation (Musrenbang) was conducted and also lacking responsibility from the government in prioritizing the road infrastructure development in Samar Kilang, increasing budget allocation in road development in Samar Kilang, increasing budget allocation in road development, enhancing cooperation among all parties involved, pay more attention to road infrastructure development in Samar Kilang and provide policies priority in increasing budget allocation to the road infrastructure development.

Keywords: Defeat, Damai (Peace) Aceh Party

Analisis Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur
Pemukiman Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama
Pasca 13 Tahun Pemekaran Kabupaten Bener Meriah

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan, mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekatnya tujuan dari pemekaran wilayah adalah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya ([http://www.bongkarnews.online/2017/12/pemekaran-daerah-untuk pemerataan](http://www.bongkarnews.online/2017/12/pemekaran-daerah-untuk-pemerataan)).

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten termuda dalam wilayah provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 7 Januari Tahun 2004. Yang saat sekarang ini terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Adapun alasan wilayah ini untuk dimekarkan yaitu untuk memperbaiki ketertinggalan ekonomi dan pemerataan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Lahirnya kabupaten Bener Meriah sudah menginjak usia 13 tahun. Namun makna dari suatu kemerdekaan belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat contohnya masyarakat yang ada di Pemukiman Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener meriah (<http://gayo.hol.es./wilayah/benermeriah/bener-meriah>).

Daerah Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu daerah tertinggal di Indonesia, dengan kata lain belum menikmati kemerdekaan yang selama 72 Tahun lamanya sudah diproklamkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Masyarakat yang ada di daerah tersebut belum bisa menikmati makna merdeka secara hakiki dan sebuah harapan konsensus pemuda pada 89 Tahun silam terpenuhi, dimana

harapan dalam sebuah keputusan yang kemudian disebut sumpah pemuda, yaitu harapan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama merupakan daerah memiliki usia paling tua di tanah dataran Tinggi Gayo, di mana sebagian besar etnis Gayo berasal dari daerah tersebut. Ketertinggalan daerah Samar Kilang yang memiliki jumlah penduduk 4.300 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 6.650 telah di rasakan sejak puluhan tahun lalu dari semenjak daerah itu ada dan sebelum Kabupaten Bener Meriah dimekarkan dari Aceh Tengah masyarakat setempat belum bisa menikmati pembangunan secara optimal layaknya seperti daerah-daerah lainnya (<http://lintasgayo.co/2015/02/10/samarkilang-desa-desa-tua-yang-tertinggal--bag-3>).

Harapan dari pemekaran Kabupaten Bener Meriah yaitu untuk pemerataan pembangunan ternyata tidak dapat membawa perubahan bagi Samar Kilang. Karena sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Bener Meriah Samar Kilang tetap menjadi sebuah daerah terisolir yang belum mendapatkan pelayanan baik dari pemerintah. Padahal nama kabupaten yang dimekarkan dari Aceh Tengah itu sendiri, Bener Meriah berasal dari nama salah satu anak kerajaan terbesar di Gayo yaitu kerajaan Linge yang menghabiskan masa hidupnya di Samar Kilang dan saat ini dimakamkan di Buntul Samar Kilang.

Ketertinggalan Pemukiman Samar Kilang dapat dibuktikan dengan keadaan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada ketertinggalan Pemukiman Samar Kilang dari segi pembangunan infrastruktur transportasi yaitu jalan. Karena akibat dari buruknya pembangunan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan di wilayah ini akhirnya berpengaruh terhadap buruknya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan kehidupan ekonomi warga yang ada di pemukiman tersebut.

Buruknya pembangunan infrastruktur di Pemukiman Samar Kilang dapat dilihat dari keadaan jalan yang menghubungkan Samar Kilang dengan pusat kota Kabupaten Bener Meriah yang saat ini rusak parah sehingga mempersulit arus transportasi dan pengangkutan bahan pangan dari Pondok Baru menuju Samar Kilang. Sepanjang jalan akan mudah di

didapati badan jalan yang berlubang, kondisi ini akan semakin buruk apabila saat musim hujan tiba karena selain ruas jalan yang berlubang juga akan sangat mudah didapati kubangan air bercampur lumpur yang terdapat di sepanjang jalan menuju Pemukiman Samar Kilang tersebut. Menurut salah satu masyarakat Samar Kilang Khairul Lina, sejauh ini belum pernah ada perbaikan untuk jalan yang menuju daerah Samar Kilang tersebut, masyarakat setempat sangat berharap agar pemerintah melakukan perbaikan terkait kondisi jalan yang rusak parah agar mereka dapat menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh negara seperti mana yang telah di rasakan oleh masyarakat lainnya (<http://aceh.tribunnews.com/2017/04/27/sepanjang-jalan-samar-kilang-seperti-kubangan-kerbau>).

Akibat dari kondisi jalan yang rusak parah dan sulit untuk di lewati ini menyebabkan ketimpangan ekonomi antara Samar Kilang dengan daerah lain yang berada di Kabupaten Bener Meriah. Sebagian besar masyarakat Samar Kilang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Namun akibat dari kondisi jalan yang buruk menyebabkan susah nya pengangkutan hasil produksi perkebunan ke pasar. Bahkan di Samar Kilang ini harga-harga barang lebih mahal dari harga biasa pada umumnya, misalnya harga bensin jenis pertalite yang ada di SPBU harganya berjumlah Rp.7.500 sementara harga yang terdapat di daerah Samar Kilang bisa mencapai Rp. 10.000, biaya produksi pertanian mahal sementara harga hasil produksi perkebunan lebih murah, sehingga ini menyebabkan kehidupan masyarakat yang berada di Samar Kilang menjadi tidak sejahtera (<http://www.kompasiana.com/amp.feriyanto.com/warga-samar-kilang-istiqamah-dalam-keterisoliran>).

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Pemukiman Samar Kilang khususnya dari segi infrastruktur transportasi memberi dampak yang buruk bagi pendidikan yang terdapat di daerah Pemukiman Samar Kilang, meskipun saat ini telah terdapat tempat pendidikan yang di mulai dari tingkat SD hingga SMA, namun fasilitas serta tenaga pengajar yang tersedia di pemukiman tersebut hingga saat ini masih belum dapat memenuhi standar sebagaimana tempat pendidikan lain pada umumnya. Akibat dari ruas jalan yang sangat sulit untuk dilewati menyebabkan tidak ada tenaga pengajar yang mau tinggal dan menetap di wilayah pemukiman tersebut.

Dan hal ini menyebabkan kurangnya tenaga pengajar yang tersedia di sekolah-sekolah yang terdapat di Pemukiman Samar Kilang.

Dampak dari kondisi jalan Pemukiman Samar Kilang juga memberi pengaruh buruk terhadap infrastruktur kesehatan yang terdapat di wilayah Pemukiman Samar Kilang. Setelah Kabupaten Bener Meriah dimekarkan pemerintah telah membangun fasilitas berupa satu unit pukesmas untuk masyarakat Samar Kilang, hal ini guna untuk memudahkan masyarakat setempat di dalam melakukan kegiatan yang menyangkut dengan kesehatan. Namun akibat dari kondisi jalan yang tidak memadai ini menyebabkan fasilitas kesehatan yang tersedia tidak dapat berfungsi secara baik, karena akibat dari kondisi jalan ini menyebabkan tidak adanya tenaga kesehatan yang tinggal di daerah pemukiman Samar Kilang ini jadi hal ini berdampak terhadap seringnya pukesmas yang terdapat di wilayah ini tidak berpungsi akibat dari tidak ada tenaga pekerja disana (wawancara bersama bapak Alamsyah Reje Desa Kutelah Lane).

Hipotesis awal yang didapat dalam penelitian ini adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Pemukiman Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah di sebabkan karena keberadaan Pemukiman Samar Kilang yang terlalu jauh dari pusat perkotaan sehingga pemerintah sulit menjangkau daerah tersebut, selain itu penyebab ketertinggalan pembangunan infrastruktur di daerah ini yaitu akibat dari lemahnya kemampuan sistem politik dalam mengelola sumber daya baik secara alam maupun manusianya. Sehingga pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan di Pemukiman Samar Kilang karena daerah ini tidak memiliki sumber daya baik secara alam maupun manusianya.

Seharusnya dengan adanya pemekaran kabupaten, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara baik. Masyarakat dapat mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah, serta dapat merasakan pembangunan infrastuktur yang merata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bener Meriah yang sudah berjalan 13 tahun belum bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang ada di Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data berdasarkan data primer yang diperoleh dari wawancara, serta data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reje (3 orang yaitu reje desa Lengat , Goneng dan Kutelah Lane)
2. Ketua Mukim Samar Kilang
3. Imum Mukim Samar Kilang
4. Camat Kecamatan Syiah Utama.
5. Tokoh Masyarakat Samar Kilang (1 orang)

Istilah kata Reje yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah kata penyebutan untuk kepala desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Di Pemukiman Samar Kilang

Faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan di wilayah Pemukiman Samar Kilang setelah adanya pemekaran wilayah yaitu: hubungan antara pemerintah baik itu pemerintah kecamatan maupun kabupaten tidak dapat terjalin secara maksimal hal ini dikarenakan pemerintah, selain itu akibat dari tidak dimplementasikannya hasil dari musrenbang untuk perbaikan jalan yang menuju pemukiman Samar Kilang dan juga akibat dari tidak akuntabel nya para penguasa di dalam mempertanggungjawabkan kekuasaan yang telah di percayakan masyarakat kepadanya khususnya tanggung jawab untuk merespon dan memenuhi tuntutan-tuntutan dan keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat. tabel dibawah ini:

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemekaran Kabupaten Bener Meriah yaitu untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya belum dapat dikatakan berhasil, hal ini dikarenakan masih adanya wilayah yaitu Pemukiman Samar Kilang yang tertinggal akibat dari tidak terealisasinya pembangunan secara merata seperti apa yang menjadi tujuan dari suatu pemekaran wilayah. Seharusnya setelah adanya sebuah pemekaran wilayah pemerintah mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakatnya salah satunya adalah dengan cara mampu mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat yang ada di setiap wilayahnya

Dari hasil penjabaran diatas dapat dilihat bahwa ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan yang menuju Pemukiman Samar Kilang akibat dari kinerja sistem politik pemerintah yang bersangkutan belum dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan dan teori kapabilitas sistem politik yang berlaku. Berdasarkan teori kapabilitas sistem politik menurut Almond pembangunan akan berjalan dengan baik apabila dapat

mewujudkan (5) lima kemampuan sistem politik yaitu yang pertama kemampuan ekstraktif, yang kedua kemampuan distributif, yang ketiga kemampuan regulatif, yang keempat kemampuan simbolik, dan yang kelima kemampuan responsif (Wiseman, 1966:157-158) .

Agar dapat memajukan suatu pembangunan yang merata di suatu wilayah diperlukannya suatu pemerintahan yang dapat menjalankan kemampuan ekstraktif yaitu sebuah kemampuan sistem politik yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang ada baik itu sumber daya secara manusia dan alamnya dapat diolah dan dikelola untuk suatu kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk wilayah Pemukiman Samar Kilang kemampuan ekstraktif ini tidak dapat dijalankan dengan maksimal akibat dari kondisi jalan yang rusak parah menyebabkan Sumber Daya Alam tidak dapat di dikelola kegunaannya untuk masyarakat banyak, seharusnya jika sudah tersedianya jalan yang memadai Sumber Daya Alam yang ada dapat di extra atau dikelola guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Pemukiman Samar Kilang.

Selain itu dalam rangka mewujudkan sebuah pembangunan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat juga diperlukan adanya suatu kemampuan pemerintah di dalam melaksanakan kemampuan distributif secara baik, kemampuan distributif disini adalah kemampuan yang berkenaan dengan pendistribusian Sumber Daya Alam secara merata untuk mewujudkan suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh jajaran masyarakat yang berada di suatu wilayah. dan untuk wilayah Pemukiman Samar Kilang seharusnya sumber daya alam yang sudah dikelola bisa didistribusikan namun akibat dari buruknya kondisi jalan yang ada menyebabkan tidak bisa dilakukanya pendistribusian kepada masyarakat karena Sumber Daya Alam yang tersedia sudah tidak dapat di kelola. Hal ini lah yang menyebabkan perekonomian masyarakat di Samar Kilang menjadi sulit.

Untuk mewujudkan pembangunan di suatu wilayah juga diperlukan kemampuan regulatif agar dapat menjamin kepentingan masyarakat. Kemampuan regulatif adalah merupakan suatu kemampuan negara dalam

malakukan pengawasan terhadap tingkah laku setiap masyarakatnya dan menjamin hak-hak individu maupun kelompok. Dan jika di kaitkan dengan fakta yang ditemukan saat wawancara dilapangan pemerintah kabupaten dan kecamatan tidak mampu melakukan pengawasan yang mampu membuat suara masyarakat Samar Kilang menjadi terwakili mengenai hal perbaikan untuk jalan ketika musrenbang di lakukan, dan hal ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi apa yang menjadi hak-hak seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah termasuk masyarakat yang berada di Samar Kilang.

Selain itu agar dapat mewujudkan peningkatan pembangunan yang merata di suatu wilayah juga diperlukan kemampuan simbolik dari sebuah sistem politik, yaitu suatu kemampuan sistem politik yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah di dalam membuat suatu kebijakan yang mampu diterima oleh seluruh masyarakat. Dan jika dikaitkan dengan masyarakat Samar Kilang pada saat ini simbol tentang sebuah pemerintahan sudah mulai hilang dari mata masyarakat, karena kepercayaan masyarakat Samar Kilang akan pemerintah sudah tidak ada lagi, hal ini di sebabkan karena tidak adanya sebuah kebijakan yang terealisasi dari pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi akses utama para masyarakat Samar Kilang meskipun masyarakat sudah sering menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan.

Selain itu juga agar pemerintah mampu mewujudkan suatu pembangunan yang merata di suatu wilayah diperlukan kemampuan sistem politik yang berkenaan dengan kemampuan responsif, kemampuan responsif adalah kemampuan respon pemerintah yang tinggi terhadap aspirasi-aspirasi yang berasal dari masyarakat, jika kemampuan tersebut dapat dilaksanakan maka dapat dipastikan bahwa setiap tuntutan dan aspirasi yang berasal dari masyarakat akan dapat terpenuhi. Dan bagi masyarakat Samar Kilang pemerintahan pada saat sekarang ini baik itu pemerintahan yang berada di tingkat Kecamatan Syiah Utama, pemerintah yang berada di tingkat kabupaten dan juga pemerintah yang berada di provinsi tidak memiliki kemampuan responsif, karena selama ini mereka sudah sering menyampaikan aspirasi beserta keluhan mereka mengenai kondisi jalan yang menjadi akses penghubung sangat rusak parah, namun

dari dulu hingga sekarang pemerintah belum juga merespon tuntutan-tuntutan mereka.

2. Kebijakan Pemerintah Terkait Keteringgalan Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Pemukiman Samar Kilang

Selaku pemegang kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat pemerintah yang mempunyai wewenang tertentu harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi untuk melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Agar keadilan serta kesejahteraan bagi kehidupan seluruh masyarakatnya dapat terwujud, di perlukan sebuah tanggung jawab penuh dari pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Berdasarkan permasalahan yang telah di uaraikan di atas pemerintah yang berada di Kecamatan Syiah Utama dan juga pemerintah yang berada di Kabupaten Bener Meriah harus sudah mulai membenahi sistem pemerintahan guna untuk terciptanya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat yang berada di Pemukiman Samar Kilang.

Untuk keteringgalan wilayah Pemukiman Samar Kilang penelitian ini menawarkan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat mengenai buruknya kondisi jalan yang menjadi akses utama yang menghubungkan Pemukiman Samar Kilang dengan wilayah lainya yaitu:

1. Memprioritaskan pembangunan untuk peningkatan jalan serta memperbaiki kondisi jalan utama yang menuju wilayah Pemukiman Samar Kilang.
2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan mengingat pentingnya jalan bagi kehidupan manusia.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan Daerah.
4. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait guna untuk mempercepat terwujudnya perbaikan untuk infrastruktur jalan bagi wilayah Samar Kilang.
5. Dan untuk pemerintahan provinsi, seharusnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur jalan di

Pemukiman Samar Kilang, guna untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengejar ketertinggalan minimnya infrastruktur jalan dengan daerah-daerah lain.

6. Pemerintah provinsi juga harus menempatkan prioritas kebijakan dan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang dialokasikan untuk membantu keuangan pemerintah daerah agar mendukung pembangunan infrastruktur jalan khususnya jalan yang menuju Pemukiman Samar Kilang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Tidak dapat terealisasinya pembangunan infrastruktur di Pemukiman Samar Kilang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, hubungan yang terjalin antar pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi tidak maksimal hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kebijakan dari pemerintah terkait hal untuk perbaikan jalan menuju Samar Kilang. Yang kedua, tidak di implementasikannya hasil dari musrenbang untuk perbaikan jalan menuju Pemukiman Samar Kilang dan yang ketiga kurangnya respon serta tanggung jawab dari pemerintah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan Ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan menuju Pemukiman Samar Kilang ini timbul disebabkan karena kinerja sistem politik pemerintah yang bersangkutan belum dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan dan teori kapabilitas sistem politik yang berlaku. Berdasarkan teori kapabilitas sistem politik menurut Almond pembangunan akan berjalan dengan baik apabila dapat mewujudkan (5) lima kemampuan sistem politik yaitu yang pertama kemampuan ekstraktif, yang kedua kemampuan distributif, yang ketiga kemampuan regulatif, yang keempat kemampuan simbolik, dan yang kelima kemampuan responsif.

2. Setelah adanya sebuah pemekaran seharusnya pemerintah kabupaten Bener Meriah mampu merealisasikan pembangunan secara jauh lebih baik lagi. Namun kondisi saat ini setelah pemekaran Kabupaten Bener Meriah ternyata pemerintah setempat belum mampu menciptakan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya seperti masyarakat yang berada di pemukiman Samar Kilang, untuk menyelesaikan permasalahan ini adapun Kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti untuk memperbaiki ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan di Pemukiman Samar Kilang adalah yang pertama, Memprioritaskan pembangunan untuk peningkatan jalan utama yang menuju wilayah Pemukiman Samar Kilang. Yang kedua, Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan. Yang ketiga, Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan. Yang keempat, Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Yang kelima, untuk pemerintahan provinsi seharusnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur jalan di Pemukiman Samar Kilang. Dan yang keenam, Pemerintah provinsi juga harus menempatkan prioritas kebijakan dan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang dialokasikan untuk membantu keuangan pemerintah daerah agar mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang menuju Pemukiman Samar Kilang.

Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa kekurangan terkait permasalahan ini. Adapun saran yang dapat tuliskan adalah:

1. Diharapkan agar semua tingkat pemerintah yang terkait mampu mempertanggung jawabkan secara baik tugas dan kekuasaan yang mereka miliki, dan juga mampu menjalin kerja sama yang baik antar pemerintah agar mendukung untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu juga pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian yang mendalam terkait buruknya kondisi jalan yang menghubungkan

Samar Kilang dengan wilayah lainnya. Karena dengan adanya perhatian dari semua pemerintah maka pembangunan di setiap wilayah akan berdampak menuju kearah yang jauh lebih baik lagi.

2. Agar semua kebijakan mampu terealisasi dengan baik maka diharapkan agar pemerintah mampu melakukan semua tugas dan fungsinya secara transparan dan penuh dengan rasa tanggung jawab, agar masyarakat mampu melihat bukti nyata dari kinerja sebuah pemerintahan yang baik yang mampu menjamin kesejahteraan serta hak-hak setiap masyarakatnya.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Gie, The Liang. 2003. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*. Liberti

Yogyakarta

H.i, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pamudji. 2000. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.

Poerwadarminta, W. J. S. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group

Wiseman, H. Victor. 1966. *Political system : some sociological approaches*. Praeger.



Internet

http://www.bongkarnews.online/2017/12/pemekaran-daerah-untuk_pemerataan. Di akses pada 04 Desember 2017.

<http://gayo.hol.es./wilayah/benermeriah/bener-meriah>. Di akses pada 15 Oktober 2014.

<http://lintasgayo.co/2015/02/10/samarkilang-desa-desa-tua-yang-tertinggal--bag-3>. Di akses pada 14 Februari 2015.

<http://aceh.tribunews.com/2017/04/27/sepanjang-jalan-samar-kilang-seperti-kubangan-kerbau>. Di akses pada 27 April 2017